

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 10

# DPRD Sahkan APBD Kota Semarang 2019 Sebesar Rp4,9 Triliun

**SEMARANG** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang akhirnya mengesahkan Rancangan APBD Kota Semarang tahun 2019, menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sebelum disahkan menjadi Perda, pembahasan RAPBD 2019 sempat menjadi tarik ulur di tingkat komisi.

Pengesahan Perda APBD Kota Semarang 2019 ini dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD setempat, Kamis (14/11) lalu. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, didampingi pimpinan dewan lainnya, yakni Joko Santoso, Wiwin Subiyono, dan Agung Budi Margono.

Rapat paripurna itu dihadiri segenap anggota dewan, sedangkan dari pihak eksekutif, diwakili Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Plt Sekda Kota Agus Riyanto, dan para kepala OPD.

Dalam penetapan tersebut, total belanja pada APBD 2019 sebesar Rp 4,9 triliun. Anggaran ini turun dibanding belanja Kota Semarang 2018, yang mencapai Rp 5,1 triliun.

Dari hasil pengesahan Raperda 2019 ini, juga terjadi penurunan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, terutama pada pos belanja langsung. Pengurangan anggaran itu,

karena dialihkan ke belanja tidak langsung, seperti misalnya gaji pegawai.

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, mengatakan pengesahan Raperda APBD Kota Semarang ini diharapkan segera diikuti dengan pelaksanaan program kerja.

"APBD Kota Semarang 2019 sudah disahkan, program-program pemerintah harus segera dilaksanakan agar masyarakat bisa mendapat manfaat dari pembangunan kota," ujarnya.

Dia berharap, eksekutif tidak lagi beralasan, bahwa pembahasan anggaran menjadi penghambat kegiatan pembangunan. Selain penetapan APBD Kota Semarang tahun 2019, rapat paripurna tersebut juga mengesahkan

tentang program pembentukan daerah DPRD Kota Semarang Tahun 2019.

Politisi asal PDIP ini mengakui, sempat terjadi tarik ulur pada saat pembahasan anggaran per fraksi. Perbedaan itu sering terjadi dan tidak perlu diperdebatkan, karena lumrah terjadi di era demokrasi.

Sedangkan Anggota Badan Pembentukan Perda atau BPP DPRD Kota Semarang Sugihartono pada laporannya menjelaskan, dari hasil rapat BPP, ada 15 raperda yang masuk dalam program legislasi daerah.

"Raperda yang diluncurkan, antara lain Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan lain sebagainya," ujar Sugihartono.

## ■ Pengurangan Belanja

Menanggapi penurunan APBD Kota Semarang tahun 2019 ini, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Wachid Nurmiyanto mengatakan, penurunan anggaran karena adanya pengurangan belanja langsung, seperti penurunan anggaran infrastruktur di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai penurunannya pun cukup tinggi, yakni sekitar 30 hingga 40 persen dibanding APBD Tahun 2017 lalu.

"Belum kami data secara ke-

seluruhan, tapi jika kita lihat misalnya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, jika di jumlah seluruh kegiatan proyek infrastruktur, baik jalan maupun drainase pada tahun 2017 mencapai Rp 660 miliar. Tahun 2018 mencapai Rp 510 miliar, sementara di tahun 2019 ini hanya sekitar Rp 413 miliar," ungkapnya.

Sementara Walikota Semarang, Hendrar Prihadi menjelaskan, penetapan APBD 2019 yang dilakukan sebelum akhir tahun menjadi hal yang positif. Alasannya, pengesahan Perda tersebut bisa menjadi dasar organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Semarang dalam menyusun berbagai program.

"Ini salah satu progres positif, di mana pengesahan APBD Kota Semarang tahun 2019 ini dilakukan akhir tahun. Maka mestinya di akhir November Perda APBD 2019 ini bisa menjadi sebuah pegangan untuk pelaksanaan APBD 2019. Harapannya seluruh OPD dapat memanfaatkan ini dengan baik," katanya.

Orang pertama di jajaran Pemkot Semarang ini meminta, OPD segera menyusun dan menyiapkan perencanaan kegiatan, sehingga di awal tahun 2019 dapat langsung dilakukan proses lelang.

"Jika lelang dilakukan lebih awal, secara otomatis pekerjaannya juga dapat dilakukan lebih awal," ungkapnya.

Soal penurunan pos belanja langsung, Hendi memaparkan saat ini pihaknya sedang melakukan efisiensi pos belanja langsung guna mengantisipasi pembengkakan komponen biaya belanja tidak langsung, seperti kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) 2019.

"Walaupun secara nominal turun, namun secara pos belanja langsung di tahun 2019 masih besar dibanding dengan pos belanja tidak langsung. Jika di tahun 2018 belanja langsung mencapai 68 persen, di tahun 2019 pos belanja langsung mencapai 64 persen," ungkapnya. ■ *adv*